

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Fatima Aszara Stirilita
f.aszara.st@gmail.com
Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

There was some vital quality information included in the financial statement by the Government Accounting Standard, i.e., understandability, relevance, reliability, and comparability. This research used the implementation of Government Accounting Standard (SAP) and Good Governance on the Quality of Financial Statement located in Surabaya. This research was quantitative; the sample collection of this research was obtained by purposive sampling at a regional apparatus organization (ODP) with 21 regional devices in Surabaya. The independent variable of this research used Government Accounting Standard (SAP) and Good Governance, and the dependent variable of this research used Financial Statement Quality (SKPD). The Instrument of examination used a validity test and reliability test. Moreover, the data analysis used multiple linear regressions. Based on the research result, the variable of Government Accounting Standard (SAP) and Good Governance had a positive and significant effect on the quality of the financial statement of the city of Surabaya. Moreover, the hypothesis stated in this research was proven.

Keywords: government accounting standard, good governance, quality of financial

ABSTRAK

Beberapa kualitas penting, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang berada di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada Organisasi Perangkat Daerah (ODP) dengan jumlah sampel sebanyak 21 Perangkat Daerah yang berada di Kota Surabaya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *Good Governance* dan variabel terikat yang digunakan Kualitas Laporan Keuangan (SKPD). Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan ini semua hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini terbukti.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintah, *good governance*, kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan sistem akuntansi, oleh karena itu sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan kemampuan manusia untuk menjalankan sistem yang ditetapkan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, maka pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal pula. Sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan dalam mengambil sebuah keputusan.

Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Penelitian Angelicca (2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat pengaruh positif. Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada suatu daerah maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Surabaya dan apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Surabaya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tolak ukur dalam menetapkan kualitas laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dapat memahami prinsip-prinsip *good governance* yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di SKPD Pemerintah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORI

Teori Kegunaan Informasi

Menurut Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Konsep Good Governance

Menurut Widodo (2001:18) konsep "*governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, akan tetapi peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Nisjar (1997:119) mengatakan bahwa *governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Osborne dan Gaebler (1992) berpendapat bahwa *good governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000:1) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Prinsip-prinsip Good Governance

Menurut Masnun (2018), kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja dari suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Terkait dengan laporan keuangan, *good governance* memiliki beberapa prinsip tersendiri. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut diuraikan sebagai berikut:

(1) Prinsip Kewajaran (*Fairness*), menurut prinsip ini laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar apabila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang wajar berarti bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; (2) Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan yang efektif; (3) Prinsip Transparansi, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan, dan kepercayaan stakeholder tergantung pada kualitas informasi yang disajikan oleh pemerintah; (4) Prinsip Responsibilitas, Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Organisasi Sektor Publik

Gusti (2010:3) dijelaskan secara sederhana sektor publik diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Sektor publik masih sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi politik, dan cara pengelolaan pada sektor publik.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Hal yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja sektor publik terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (1) Menciptakan akuntabilitas publik; (2) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; (2) Memperbaiki kinerja periode - periode berikutnya; (3) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; (4) Memotivasi pegawai.

Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. "Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi acuan bagi : (1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya; (2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; (3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan

standar; (4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Terjadinya pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.

Terdapat 13 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, (a) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan; (b) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; (c) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas; (d) PSAP No. 04 CaLK; (e) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan; (f) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi; (g) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap; (h) PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan; (i) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban; (j) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan; (k) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi; (l) PSAP No. 12 Laporan Operasional; (m) PSAP No. 13 Laporan Keuangan BLU.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri dari 2 basis yaitu (1) SAP Berbasis Kas, Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010); (2) SAP berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Kualitas Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2004) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*); 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*); 3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*); 4) Kelangsungan organisasi (*viability*); 5) Hubungan masyarakat (*public relation*); dan 6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah: (1) Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur adalah manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timeliness*), lengkap; (2) Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik adalah penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), netralitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

H₁: Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Good governance telah menjadi hal yang penting bagi setiap entitas saat ini, tidak hanya sektor swasta, sektor publik dan pemerintahan pun memperhitungkan hal ini. *Good governance* menjadi salah satu alat ukur atau patokan bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi. Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari negara.

H₂ : *Good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada dasar filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada umumnya penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini kepala sub-bagian keuangan dan pegawai keuangan di 21 Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Menurut Natoatmodjo (2010), *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam pemilihan sampel diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Pegawai dinas SKPD di Pemerintah Kota Surabaya, (2) Kepala sub-bagian keuangan, (3) Staf bagian perencanaan dan keuangan/bendahara pembantu. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, maka diperoleh 14 SKPD yang memenuhi kriteria sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Natoatmodjo (2010), *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden atau subjek dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *self report*, yaitu dengan menyebarkan kuesioner (*Offline* dan *Online*) kepada responden penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer.

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan data primer, dimana data diperoleh setelah melakukan pembagian kuesioner pada masing-masing sub-bagian keuangan di SKPD Pemerintah Kota Surabaya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah tersebar di SKPD Pemerintahan Kota Surabaya.

Setelah pembagian kuesioner di 21 SKPD Pemerintah Kota Surabaya, hanya 14 SKPD Pemerintah Kota Surabaya yang memberi tanggapan kepada peneliti. Dari 14 SKPD Pemerintah Kota Surabaya, pembagian kuesioner sebanyak 1-6 kuesioner per instansi. Kuesioner yang terkumpul selama penelitian sebesar 50 kuesioner atau 50 responden yang mengisi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam rangka memecahkan masalah ataupun pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan metode regresi berganda. Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Data yang diperoleh diuji terlebih dahulu secara statistik dengan uji validitas dan uji realibilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan, uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi dari hasil pengukuran bila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih.

Dalam menunjang pembahasan, analisis serta pengujian hipotesis data, diperlukan pengolahan dan penganalisisan data menggunakan program yang terkomputerisasi. Pada suatu penelitian, teknik analisis data merupakan salah satu langkah penting untuk penelitian tersebut. Karena bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data penelitian dan menyimpulkan kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti. Perhitungan analisis data menggunakan program SPSS (*Statistical Package for The Social Sciences*). Analisis data dalam penelitian menggunakan metode regresi 7 linear berganda. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat, maka data tersebut wajib melewati uji asumsi klasik.

$$KLK = \alpha + \beta_1.SAP + \beta_2.GG + e$$

Keterangan:

KLK : Kualitas laporan keuangan

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

GG : *Good governance*

e : *Error*

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari: (1) Uji validasi dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian. Menurut Ghazali (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Rahmawati et al (2014), pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bevariate pearson (product moment pearson) yakni teknik korelasi, dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila signifikan kurang dari 0,05 atau 5%, (2) Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini uji reliabilitas data yaitu dengan menggunakan metode internal consistency reliability yang menggunakan uji cronbach alpha untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,6 (Ghazali, 2016:47).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk pengujian yang bertujuan untuk menguji kelayakan suatu penelitian atas model regresi yang digunakan dan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan harus terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik terdiri dari: (1) Uji normalitas yang digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, (2) Uji Multikolinieritas, yang digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen Metode yang digunakan dalam penelitian adalah nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, (3) Uji Heteroskedastisitas, yang digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode scatterplot, (4) Uji Autokorelasi, yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan uji Durbin-Watson.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Hipotesis terdiri dari: (1) Uji koefisien determinasi (R^2), yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien antara 0 sampai dengan 1, (2) Uji kelayakan model (uji f), yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, (3) Uji t , yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi tiap variabel independen kurang dari 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan lain-lain (Ghozali, 2016:19). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai demografi pada responden penelitian. Data demografi tersebut berupa usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja dan latar belakang pendidikan. Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan table distribusi frekuensi.

Statistik deskriptif berfungsi untuk menampilkan penjelasan ataupun gambaran berbagai karakteristik data yang berasal dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum (maks), nilai minimum (min) dari masing-masing variabel penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif model 1 dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
TOTAL.KLK	50	68	83	72,50	4,958
TOTAL.SAP	50	54	85	69,78	8,323
TOTAL.GG	50	48	60	55,34	3,396
Valid N (listwise)	50				

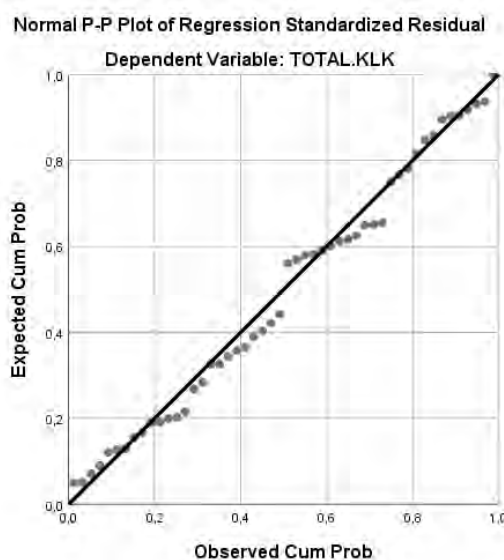
Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai mean sebesar 69,78 dengan standar deviasi sebesar 8,323. Nilai minimum sebesar 54 dan nilai maksimum sebesar 85. Sedangkan nilai standar deviasi yang terdapat pada variabel ini sebesar 8,323. Variabel *Good Governance* mempunyai nilai mean sebesar 55,34 dengan standar deviasi sebesar 3,396. Nilai minimum sebesar 48 dan nilai maksimum sebesar 60. Variabel Kualitas Laporan Keuangan mempunyai nilai mean sebesar 72,50 dengan standar deviasi sebesar 4,958. Nilai minimum sebesar 68 dan nilai maksimum sebesar 83.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal atau tidaknya nilai residual yang didistribusikan oleh suatu model regresi linear berganda variabel terikat dan variabel bebas. Uji normalitas penelitian ini dengan menggunakan grafik normal P-Plot terlihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan data berdistribusi normal. Hal ini karena data residual mengikuti arah garis diagonal meskipun terdapat beberapa plot yang menyimpang dari garis diagonalnya. Selain itu, juga dapat diketahui dengan uji *kolmogrov-smirnov*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		50
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std.Deviation</i>	2,30644173
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,082
	<i>Positive</i>	0,082
	<i>Negative</i>	-0,061
<i>Test Statistic</i>		0,082

Asymp. Sig. (2-tailed)

,200^{c,d}

-
1. Test distribution is Normal
 2. Calculated from data
 3. Lilliefors Significance Correction
 4. This is a lower bound of the true significance
-

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai *asymp. sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 \geq 0,05$ menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan gambar grafik normal *probability plot* dan uji *kolmogrov-smirnov* dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas, sehingga data layak untuk diteliti.

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

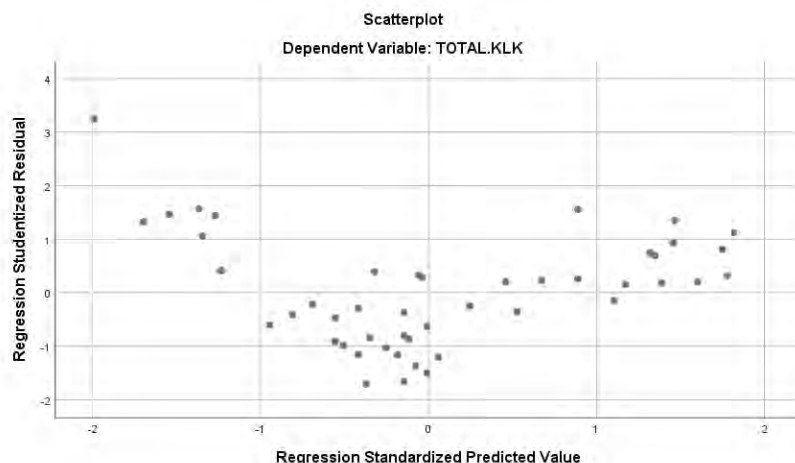
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SAP	0,874	1,144	Bebas Multikolinieritas
GG	0,874	1,144	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai *tolerance* untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 0,874 dan penerapan *Good Governcane (GG)* sebesar 0,874. Nilai *tolerance* setiap variabel independen menunjukkan $\geq 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu, juga diketahui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 1,144 dan penerapan *Good Governcane (GG)* sebesar 1,144. Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* setiap variabel independen menunjukkan < 10 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastistas

Tujuan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gozali, 2018). Untuk mendeteksi terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat menggunakan metode scatterplot.



Gambar 2
Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan model layak digunakan, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y atau bisa dikatakan penelitian ini bersifat heteroskedastisitas karena titik-titik yang terdapat dalam gambar diatas menyebar secara acak atau tidak beraturan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini, mendapatkan hasil analisis regresi sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coeffisien		Standar Coeffisien	t	sig
	B	Std error	Beta		
(contant)	23,040	5,572		4,135	0,000
SAP	0,472	0,043	0,792	10,909	0,000
GG	0,299	0,106	0,205	2,824	0,007

a. Dependent Variabel: KLK

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

$$KLK = 23,040 + 0,472.SAP + 0,299.GG + e$$

Di lihat dari model persamaan regresi linear berganda diatas, maka modelnya dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) konstanta (α), dengan nilai sejumlah 23,040 menunjukkan bahwa konsep kualitas laporan keuangan bernilai 23,040 jika penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* bernilai nol (0); (2) koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (β_{SAP}), bernilai positif (searah) adalah 0,472 yang dapat diartikan bahwa apabila nilai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Begitupun sebaliknya, apabila penerapan konsep Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurun, maka Kualitas Laporan Keuangan (KLK) juga akan menurun; (3) koefisien regresi variabel penerapan *good governance* (β_{GG}), bernilai positif (searah) adalah 0,299 yang dapat diartikan bahwa apabila nilai penerapan *Good Governance* (GG) mengalami peningkatan,

maka akan diikuti dengan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Begitupun sebaliknya, apabila penerapan konsep *Good Governance* (GG) menurun, maka Kualitas Laporan Keuangan (KLK) juga akan menurun.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Parameter Regresi (R^2)

Tujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier untuk ditunjukkan berapa besarnya koefisien determinasi (R^2). Apabila hasil lebih mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Apabila hasil lebih mendekati 1 maka variabel independen memberikan hampir semua informasi variabel dependen.

Tabel 5
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,885	0,784	0,774	2,355

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R-square pada penelitian ini sebesar 0,784 yang berarti bahwa kontribusi variabel Standar Akuntansi dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 78,4% sedangkan sisanya 21,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam model.

Uji F (*Goodness of fit*)

Tujuan uji kelayakan model (Uji F) untuk mengetahui apakah variabel independen (SAP dan GG) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model mampu memprediksi nilai observasinya, sehingga model penelitian sudah tepat.

Tabel 6
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	.Sig.
Regression	943,836	2	471,918	85,091	0,000
Residual	260,664	47	5,546		
Total	1204,500	49			

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Tabel 6 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 85,091 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dimana nilai $0,000 < 0,05$, maka menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya (model penelitian layak digunakan). Sehingga nilai uji F tersebut menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tujuan uji t menguji seberapa banyak pengaruh dari variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini secara individual guna menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coeffisien		Standar Coeffisien	T	Sig
	B	Std error	Beta		
(contant)	23,040	5,572		4,135	0,000
SAP	0,472	0,043	0,792	10,909	0,000
GG	0,299	0,106	0,205	2,824	0,007

Sumber: Data Pemerintah Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ diperoleh; (1) Hasil Uji t untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (2) Hasil Uji t untuk variabel *Good Governance* diperoleh nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ yang berarti bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari uji hipotesis bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (H_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada hasil penelitian dan diperkuat oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa r-hitung yang diperoleh dari pengolahan data lebih kecil dibandingkan r-tabel.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintahan, maka akan semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelicca (2019) dengan judul Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Angelicca (2019) tersebut menunjukkan bahwa hasil penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pelaksanaan *good governance* pada SKPD di Kota Surabaya dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Good governance yang diuraikan di atas menjelaskan dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintah kepada rakyat melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya *good governance* yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

Hal tersebut didukung dengan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2), terdapat pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin baik penerapan tata kelola instansi pemerintahan maka akan semakin baik suatu laporan keuangan yang akan dihasilkan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dijelaskan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang diperkuat oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa r -hitung yang diperoleh dari pengelolaan data lebih kecil dibandingkan dengan r -tabel.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhidayat (2019) dengan judul Pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah (PSAP 01) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kabupaten Enrekang, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota dengan melalui beberapa uji statistik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja dari suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Kepada pihak yang bersangkutan dalam diharapkan meningkatkan dalam hal pelayanan agar kualitas pelayanan pada dinas membuat masyarakat yang membutuhkan nyaman; (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di luar model atau variabel yang telah dipakai dalam penelitian ini; (3) Peneli selanjutnya

dapat memperluas obyek penelitian, tidak hanya pada SKPD Kota Surabaya tetapi juga dapat di kota lain atau kabupaten yang lainnya.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa hal yang menjadi keterbatasan selama penelitian berlangsung yaitu sebagai berikut; (1) Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner serta jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga dapat menimbulkan perbedaan atas maksud serta tujuan pernyataan. Dari 70 kuesioner yang telah disebar, hanya 50 yang kembali dan memenuhi syarat atau kriteria, diantaranya terdapat 20 kuesioner yang tidak kembali. Hal ini dikarenakan adanya kesibukan responden dan jumlah pada bidang yang dituju tidak sesuai dengan target penelitian; (2) Penelitian ini hanya meneliti pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Surabaya. Masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayat, S .2019. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 01) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Makassar.
- Angelicca, M. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 8. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gusti, A.R.I. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Grafindo. Jakarta
- Kiswara, E. 2011. Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No.2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. LAN. RI.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masnun. 2018. *Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. *Jurnal of Economics and Business* 2(1): 175-182.
- Nisjar, S. K. 2001. Beberapa Catatan Tentang "Good Governance". *Jurnal Administrasi Dan Pembangunan* 1(2):119
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Osborne, D. and P. Plastrik. 1992. "Banishing Bureaucracy : The Five Strategic for Reinventing Government". David Osborne and Ted Gaebler. "Reinventing Government": How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector".
- Rahmawati, A., Fajarwati dan Fauziah. 2014. *Statistika Teori dan Praktek Edisi II*. BPFE. Yogyakarta.

- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Legalitas. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Widodo, J. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia. Surabaya.